

Kemiskinan Masyarakat di Indonesia: Perspektif Sosiologi Islam dan Fenomenologi Barat

Yulasteriyani^{1*}, Randi², M. Hasbi³

^{1,2} Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia, yulasteriyani@fisip.unsri.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

DOI: doi.org/10.19109/intizar.v25i2.4463

Abstrak

Tulisan ini memaparkan bagaimana konsep miskin dipahami menurut perspektif ajaran agama Islam yang disandingkan dengan fenomenologi Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan memiliki variasi makna dan tolok ukur seperti miskin perspektif ekonomi, miskin dilihat dari sosial budaya, serta miskin perspektif agama. Miskin dalam perspektif Islam mutlak sama yakni kondisi manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup sehari. Sedangkan perspektif fenomenologi bervariasi seperti BPS pengeluaran per kapita per bulan yang dibawah garis kemiskinannya (Badan Pusat Statistik), pendapatan kurang dari PPP \$1 perhari (Bank Dunia), tidak berpenghasilan setara 320 kg beras/pedesaan dan 480 kg beras/perkotaan per tahun (Sagoyo), bergantung standar masyarakat bersangkutan (Panjaitan), dan ketidakberuntungan masyarakat (Suharto).

Kata Kunci: Kemiskinan, Islam, Fenomenologi Barat

Abstract

This paper describes how the concept of poverty is understood in the perspective of Islamic teachings that are juxtaposed with Western phenomenology. The research method used is qualitative with a literature study approach. This study concludes that poverty has a variety of meanings and benchmarks such as poor economic perspectives, poor social and cultural views, and poor religious perspectives. Poor in the perspective of Islam is absolutely the same, namely the human condition that cannot meet the basic needs for daily life. While phenomenological perspectives vary such as BPS per capita expenditure per month below the poverty line (Badan Pusat Statistik), income less than PPP \$ 1 per day (World Bank), not earning the equivalent of 320 kg of rice / rural and 480 kg of rice / urban per year (Sagoyo), depending on the standard of the community concerned (Panjaitan), and the community's misfortune (Suharto).

Keywords: Poverty, Islam, Western Phenomenology

Pendahuluan

Persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yakni dari 9,66 persen atau sejumlah 25.674.58 jiwa orang miskin per maret 2019 menjadi 9,41 persen atau 25.144.72 jiwa per september 2018. Menurut data BPS rata-rata pengeluaran per kapita di daerah perkotaan dan perdesaan menurut provinsi dan kelompok barang adalah Rp. 1.124.717 per bulan. Mengacu kepada konsep dan tolok ukur BPS seharusnya dengan pengeluaran per kapita yang melampaui Rp. 600.000 per bulan berarti masyarakat Indonesia telah bebas

dari kemiskinan (Statistik, 2019b). Fakta penurunan angka kemiskinan dan angka pengeluaran per kapita ini tidak ada korelasi langsung kepada subjek/masyarakat miskin itu sendiri. Bahkan tidak jarang drastis terjadi kenaikan angka miskin ketika pembagian raskin, BLT dan sebagainya pada program/kebijakan pengentasan kemiskinan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa hakikatnya pengukuran tingkat kemiskinan ini tidak sah dijadikan patokan mutlak dalam pembuatan kebijakan/program pengentasan/pemberdayaan kualitas sumber daya manusia.

Konsep dan tolok ukur kemiskinan hakikatnya tidak berpatokan berapa dan bagaimana pendapatan/pengeluaran per kapita masyarakat karena realitanya masyarakat sebagian tetap merasa miskin. Memahami fenomena kemiskinan ini permasalahannya adalah bukan seberapa besar dan kecil uang yang orang/masyarakat miliki akan tetapi seberapa bahagiah mereka kepada apa yang dimiliki. Pada akhirnya masyarakat hanya perlu bersabar dan bersyukur hidup di dunia yang fana ini hingga akhirnya ajal menjemput dengan tidak mengabaikan usaha dan doa.

Selain pandangan subjektif miskin di atas, Islam juga memiliki konsep dan tolok ukur tersendiri tentang apa dan bagaimana kemiskinan itu. Dikatakan bahwa kemiskinan berasal dari kata dalam al-Qur'an yakni *as-sakan* yang artinya lawan kata dari hal yang selalu bergejolak dan bergerak (Cahya, 2015; Lubis, 2018). Kemiskinan merupakan kondisi manusia yang tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari yang manusia lain dapat melakukannya. Sehingga Islam seakan memberikan pemahaman kepada manusia bahwa tidak ada *mindset* miskin akan tetapi yang ada hanya manusia tidak pandai berusaha beranjak untuk menata hidup lebih baik. Kemudian tidak ada istilah malang dan terlantar/tersisih bagi manusia miskin jika perintah Allah Swt dilaksanakan dengan iman dan takwa. Disinilah Islam mengajarkan hidup bersyukur dan bersabar untuk mencapai rida Allah sehingga tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagian dari ajaran Islam mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan manusia kekayaan dan kecukupan sehingga disini tidak ada istilah kemiskinan. Jikapun manusia merasa kekurangan/miskin, Tuhan justru selalu membebaskan mereka agar terbebas dari nya melalui zakat, infak dan sedekah.

Islam mengajarkan secara lengkap perihal kehidupan di muka bumi mulai dari hubungan antar sesama manusia, makhluk lain sampai pada hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tugas dan fungsi untuk beribadah dan menyembah Allah Swt. Alih-alih sebagai khalifah/pemimpin di bumi, manusia justru kadang lebih buruk dan jahat daripada binatang yang tak berakal, demi mengejar kebahagiaan dunia mereka berlomba-lomba menjadi kaya berharta dengan menghalalkan segala cara.

Disamping itu Islam juga menganjurkan hambanya untuk menjadi kaya dan berharta agar manusia semakin mudah meningkatkan iman dan takwa kepada-Nya. Realita sosial budaya masyarakat mencatat sejarah kriminalitas pembunuhan terjadi akibat kerakusan dan kebodohan manusia melakukan dosa demi orientasi kekayaan dunia (Ilyas, 2016).

Penelitian ini fokus pada topik subjektivitas kemiskinan dilihat dari pandangan Islam dan fenomenologi Barat (Schutz). Disini akan dipaparkan bagaimana Islam memaknai realita sosial kemiskinan dengan kacamata dalil Qur'an Hadis kemudian disandingkan dengan konsep penafsiran dunia sosial dalam pandangan fenomenologi Schutz.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap karya yang terdapat pada kajian-kajian ilmiah seperti artikel ilmiah, buku, data informasi lembaga-lembaga terkait dan lain sebagainya. Studi kepustakaan ini dianggap mampu mengeksplorasi fenomena kemiskinan dalam perspektif Islam dan fenomenologi Schutz karena kajian kepustakaan mampu mengeksplorasi kajian-kajian terkait secara cepat, akurat dan jelas. Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data digunakan untuk menggali kebenaran informasi terkait melalui berbagai metode dan perolehan sumber data. Dengan melibatkan observasi, dokumentasi tertulis, arsip, serta artikel-artikel ilmiah terkait. Sedangkan pengelolaan data dengan melakukan reduksi data, reduksi data ini dimaksudkan untuk mendapatkan analisis yang tepat dan ilmiah tentang seperti apa dan bagaimana objek penelitian pada dua sudut pandang Islam versi teori barat/fenomenologi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Masyarakat Miskin Menurut Pandangan Islam

Islam sebagai *rahmatun lil a'lamin* adalah pernyataan bahwa ajaran agama Islam membawa tuntunan yang baik untuk kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Segala aktivitas kehidupan manusia di muka bumi memiliki aturan dan kaidah yang jelas baik melalui dalil al-Qur'an maupun Hadis. Diantara kaidah yang diatur dalam Islam

adalah realitas sosial kemiskinan. Fenomenologi Schutz memahami konsep/tolok ukur kemiskinan memiliki variasi yang berbeda satu dengan lainnya tergantung bagaimana kesadaran, subjektivitas, intersubjektivitas manusia di dalam dunia kehidupan sehari-harinya. Sehingga muncul konsep/tolok ukur kemiskinan seperti perspektif pemerintah nasional/internasional serta sudut pandang akademisi dan teoritis. Berbeda dengan Islam, kemiskinan memiliki makna yang general di seluruh penjuru dunia sesuai dengan paradigma mutlak al-Qur'an dan Hadis. Kemiskinan menurut perspektif Islam (Mazhab Hanafi) adalah kondisi dimana manusia meminta-minta, orang yang tidak memiliki apapun (Mazhab Maliki), serta kondisi orang yang mampu memenuhi kebutuhan namun belum mencukupi (Mazhab Syafi'i dan Hambali).

Kata miskin asal katanya adalah *as-sakan*, artinya lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak (Faris, 1979). Huruf *sin*, *kaf* dan *nun* adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebalikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatakan, *sakana asy-syai'u yaskunu sukunan sakinan* (Lubis, 2018). Terkait dengan definisi miskin, Nabi Saw bersabda yang artinya "Orang yang miskin bukanlah orang yang merasa telah cukup dengan satu atau dua buah kurma, atau sesuap atau dua suap makanan. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak meminta-minta dan menunjukan kemiskinannya kepada orang lain. Jika kalian mau, bacalah firman Allah: "Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain." (H.R. Bukhari).

Makna/tolok ukur kemiskinan perspektif Islam di atas berpatokan pada pemenuhan kebutuhan dasar yakni pangan, sandang, dan papan. Bahkan ada dalil Al-Qur'an Hadis mengatakan orang dikatakan miskin adalah orang yang tidak terpenuhi makan/pangan untuk satu hari dan sebaliknya. Betapa Tuhan memerintahkan umat manusia untuk selalu bersyukur dan bersabar atas nikmat rezeki yang diberikan. Sehingga dalam dalil Al-Qur'an-Nya dijelaskan bahwa Tuhan menakdirkan manusia hidup dalam kekayaan dan kecukupan bukan kemiskinan. Allah Swt berfirman: "dan sesungguhnya Dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan." (Q.S. Al-Qomar: 48).

Jika manusia yang merasa tidak cukup/miskin Tuhan justru ingin membebaskan dia dari realitas

sosial itu. Sebagai wujud Tuhan menghendaki umatnya untuk bebas dari kemiskinan diperintahkan manusia untuk berzakat. "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah." (QS. At-Taubah: 60).

Jika zakat juga dirasa tidak cukup maka Tuhan memerintahkan infak salah satunya kepada orang fakir/miskin: "Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan". (QS. Al-Baqarah: 215). Akan tetapi apabila manusia bersangkutan tetap tidak merasa cukup akan zakat, infak dan sedekah maka hakikatnya manusia ini adalah termasuk orang yang kufur akan nikmat rezeki Tuhan. Allah Swt berfirman: "Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku." (Q.S. Yusuf: 53)

Miskin disebabkan oleh manusia tidak pandai bersyukur hidup yaitu manusia yang berdiam diri enggan berusaha mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Shihab (2017) menjelaskan bahwa miskin sebagai berarti diam atau tidak bergerak diperoleh kesan bahwa faktor utama penyebab kemiskinan adalah sikap berdiam diri, enggan, atau tidak dapat bergerak dan berusaha. Keengganan berusaha adalah penganiayaan terhadap diri sendiri, sedangkan ketidakmampuan berusaha antara lain disebabkan oleh orang lain diistilahkan pula dengan kemiskinan struktural. Kesan ini lebih jelas lagi bila diperhatikan bahwa jaminan rezeki yang dijanjikan Tuhan, ditujukan kepada makhluk yang dinamainya *dabbah*, yang artinya ialah yang bergerak. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an berikut ini: "Tidak ada satu dabbah pun di bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya" (Q.S. Hud: 6). Kemudian dijelaskan kembali pada ayat berikut ini: "Allah telah menganugerahkan kepada kamu segala apa yang kamu minta (butuhkan dan inginkan). Jika kamu

menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya tidak mampu menghitungkannya. Sesungguhnya manusia sangat aniaya lagi sangat kufur”. (Q.S. Ibrahim: 34).

Dalil-dalil al-Qur'an di atas jelas memahamkan manusia bahwa Allah Swt telah menganugerahkan segala karunia-Nya di alam semesta ini berupa segala rezeki yang ada di bumi sehingga manusia diperintahkan untuk berusaha dan berdoa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mentaati segala perintah-Nya. Fenomena kemiskinan dalam pandangan Islam juga dapat dipahami sebagai kualitas rendahnya sikap *qana'ah*/perasaan syukur manusia kepada Tuhan. Hakikatnya bagaimana pun kondisi ekonomi manusia jika dia bersyukur dan *qana'ah* maka dia mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga ada korelasi kekayaan/material dengan kesuksesan manusia dalam hidup dan setelah matinya.

Manusia yang pandai sabar dan syukur senantiasa berbahagia dalam kehidupannya baik kehidupan dunia maupun akhirat. Sehingga bagaimanapun makna/tolok ukur kemiskinan yang berlaku di Indonesia masyarakat tetap berlaku bijak dan pandai bersyukur kepada Tuhan. Karl Marx yang sangat masyhur sampai saat ini juga menjelaskan jika agama adalah candu masyarakat, segala tindakan dan perilaku manusia berlandas pada pedoman kitab sucinya. Dalam konteks sistem ekonomi Marx bahwa keyakinan beragama manusia kepada Sang penciptanya mempengaruhi kesadaran manusia untuk tidak berontak pada kemiskinan dan ketertindasan. Bedanya Marx melihat lain sisi agama sebagai sesuatu yang besar berpengaruh/candu kepada manusia yang menjadikan masyarakat Eropa kalangan bawah/orang miskin berilusi kebahagiaan atas realitas kemiskinan. Menurutnya kalangan tertindas/miskin harus memprotes kepada kekuasaan politik/kalangan atas yang memanfaatkan kesabaran/keikhlasan kalangan bawah. Sedangkan ajaran Islam sempurna yakni tidak hanya nilai kesabaran/keikhlasan seperti asumsi Marx dalam menyikapi kehidupan/kemiskinan, namun umat Islam *kaffah* juga tentang usaha/doa agar keberkahan hidup mencapai bahagiah dunia dan akhirat.

2. Fenomenologi Schutz terhadap Subjektivitas Masyarakat Miskin

Analisis di atas dilihat dari perspektif Islam dengan dalil Al-Qur'an Hadis, selanjutnya disini dipaparkan konsep turunan dari filsafat Admund Hussel yakni Alfred Schutz. Isu kemiskinan masyarakat Indonesia ini dijelaskan dengan konsep filsafat fenomenologi Schutz. Tokoh-tokoh fenomenologi ini diantaranya Edmund Husserl, Alfred Schutz, Peter. L. Berger dan lainnya. Namun tulisan ini akan fokus kepada fenomenologi Alfred Schutz. Dimana dikatakan bahwa fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, *phainoai*, yang berarti 'menampak' dan *phainomenon* merujuk pada 'yang menampak'. Istilah fenomenologi diperkenalkan oleh Johann Heirinck. Meskipun demikian pelopor aliran fenomenologi adalah Edmund Husserl. Fenomenologi berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak dapat berdiri sendiri, karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran yang lebih lanjut (Kuswarno, 2009).

Pemahaman secara subyektif terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menerjemahkan dan memahaminya serta yang akan beraksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh aktor.

Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada satu bentuk dari subjektivitas yang disebutnya, antar subjektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubjektivitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi, tergantung kepada pengetahuan tentang peranan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi.

Pemikiran Schutz juga dipusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut kehidupan dunia atau dunia kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dunia intersubyektif. Dalam dunia intersubyektif ini orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh

kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Di dalam dunia kehidupan itu banyak aspek kolektifnya, tetapi juga ada aspek pribadinya. Schutz membedakan dunia kehidupan antara hubungan tatap muka yang akrab dan hubungan interpersonal dan renggang. Sementara hubungan tatap muka yang intim sangat penting dalam kehidupan dunia, adalah jauh lebih mudah bagi sosiolog untuk meneliti hubungan interpersonal secara ilmiah. Meski Schutz beralih perhatiannya dari kesadaran ke dunia kehidupan intersubjektif, namun ia masih mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran, terutama pemikirannya tentang makna dan motif tindakan individual.

Dalam pandangan fenomenologi, aktor/masyarakat adalah subjek yang melakukan interpretasi terhadap dirinya sendiri. Bagaimana makna sesungguhnya dari realita sosial/kemiskinan adalah tergantung bagaimana interpretasi aktor/masyarakat itu sendiri, sedangkan subjektifitas itu berasal dari pengalaman-pengalaman sadar aktor/masyarakat dan hasil dari intersubjektifitas terhadap dunia sosial/dunia kehidupan sehari-hari aktor/masyarakat. Sehingga konsep pengukuran kemiskinan nasional maupun internasional memiliki subjektifitas bergantung aktor/masyarakat yang mendefinisikan konsep/tolok ukur kemiskinan seperti versi BPS, Bank Dunia, akademisi maupun teoritis.

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki definisi dan kriteria tersendiri tentang apa itu miskin. Kemiskinan menurut BPS ialah untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan (Statistik, 2019a).

Menurut fenomenologi Schutz, BPS sebagai lembaga independen pemerintah memiliki dunia sadar akan dunia kehidupan sehari-hari sehingga lahir definisi miskin tersendiri menurut versinya. Dunia kehidupan sehari-hari BPS ini bisa jadi mengacu pada ekonomi sosial budaya masyarakat

Indonesia seperti nilai tukar rupiah, makanan pokok masyarakat, dan lain sebagainya. BPS menjelaskan bahwa Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Sedangkan garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (Statistik, 2019a).

Empat belas kriteria miskin menurut standar BPS, jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga terkategori miskin, sebagai berikut: 1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang; 2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan; 3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester; 4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain; 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; 6) sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan; 7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; 8) hanya mengonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu; 9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; 10) hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik; 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000,- per bulan; 13) pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; dan

14) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya (Statistik, 2019a).

Panjaitan (2000) mengatakan bahwa kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kemiskinan seperti ini disebut sebagai kemiskinan relatif. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, pendidikan, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong miskin. Subjektivitas konsep tolok ukur miskin Panjaitan tidak jauh berbeda dengan kesadaran BPS yakni tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan serta harga diri sehingga sudah sangat jelas bahwa pendefinisian ini berdasar pada dunia kehidupan sehari-hari yang bersangkutan.

Konsep kemiskinan lainnya dikemukakan oleh Bank Dunia dan, dimana kemiskinan diukur dari pengeluaran dan pendapatan seseorang atau suatu keluarga. Bank Dunia menggambarkan kondisi sangat miskin sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP\$1 per hari, dan kondisi miskin sebagai orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari PPP\$2 per hari. Secara fenomenologis Schutz bahwa dunia sosial di Barat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan Indonesia, maka dalam pemahaman dan tolak-ukur kemiskinan pun berbeda.

Selanjutnya subjektivitas miskin dari teoritis sosiologi pedesaan, Sajogyo (1982) mengkonsepsikan bahwa seseorang dikatakan miskin apabila tidak memperoleh penghasilan setara dengan 320 kilogram beras untuk daerah pedesaan, dan 480 kilogram beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Berikut ini ekuivalen konsumsi beras per kapita sebagai indikator kemiskinan:

Tabel 1. Ekuivalen Konsumsi Beras (Sajogyo, 1982)

	Perdesaan	Perkotaan
Kriteria	(kg/orang/tahun)	(kg/orang/tahun)
Melarat	180	270
Sangat melarat	240	360

Miskin	320	480
--------	-----	-----

Subjektivitas konsep dan tolok ukur Sajogyo merupakan hasil kesadaran sosial terhadap dunia kehidupan sehari-hari (*lebenswelt*) petani Indonesia khususnya Jawa Barat. Subjektivitasnya ialah pandangan Sajogyo yang memiliki ciri khas dibandingkan dengan perspektif kemiskinan lain sedangkan intersubjektivitasnya ialah fokus kajian Sajogyo dan muridnya yang konsentrasi di bidang pertanian sawah/padi. Sajogyo dan para muridnya melahirkan konsep dan tolok ukur kemiskinan spesifikasi pada konsumsi beras karena kebetulan objek penelitian mazhab Bogor waktu itu beraliran pertanian sawah/padi. Setiap aktor/pendefinisi akan memiliki subjektivitas yang berbeda-beda, kesadaran beda, intersubjektivitas, serta dunia sosial (*lebenswelt*) yang berbeda sehingga melahirkan perspektif yang berbeda-beda pula. Karena tujuan pendekatan ini adalah untuk mempelajari fenomena manusia tanpa mempertanyakan penyebabnya, realitas yang sebenarnya, dan penampilannya. Husserl mengatakan, “Dunia kehidupan adalah dasar makna yang dilupakan oleh ilmu pengetahuan. Kita kerap memaknai kehidupan tidak secara apa adanya, tetapi berdasarkan teori-teori, refleksi filosofis tertentu, atau berdasarkan oleh penafsiran-penafsiran yang diwarnai oleh kepentingan-kepentingan, situasi kehidupan, dan kebiasaan-kebiasaan kita. Oleh karena itu untuk mendapatkan hakikat sebenarnya fenomenologi menyerukan *zuruck zu de sachen selbst* (kembali kepada benda-benda itu sendiri), yaitu upaya untuk menemukan kembali dunia kehidupan. Sajogyo dan murid pun demikian berusaha memahami dan menyelami realitas sosial budaya masyarakat pada masanya sehingga menciptakan konsep/kriteria versinya.

Kepustakaan tentang kemiskinan lainnya juga dikemukakan dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, bahwa kemiskinan adalah ketidakberdayaan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan tambahan sehingga rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga miskin sangat berhubungan erat dengan: 1) masalah pendapatan yang rendah; 2) masalah gizi dan pangan; 3) masalah kesehatan; 4) masalah kematian; 5) masalah lingkungan; 6) pemukiman; 7) masalah

pendidikan; 8) masalah penguasaan iptek/keterampilan; 9) masalah pemilikan lahan; 10) masalah kesempatan kerja; dan 11) masalah prasarana kebutuhan dasar (Van, 1990).

Suharto (2009) menjelaskan sembilan kriteria yang menandai kemiskinan, yaitu: 1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan); 2) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; 3) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil); 4) rendahnya kualitas sumber daya manusia (buta huruf, rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik, air); 5) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan aset), serta guncangan bersifat massal (rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum); 6) ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan; 7) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi); 8) ketiadaan jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari negara dan masyarakat); serta 9) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Emil Salim (1984) mengemukakan, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki mereka sangat sedikit sehingga kemampuan mereka memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

Kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh kredit perbankan, mereka tidak dapat memenuhi syarat, seperti adanya jaminan kredit. Mereka terpaksa berpaling pada lintah darat yang biasanya meminta syarat pelunasan yang berat dan memungut bunga tinggi.

Ketiga, tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak sampai tamat sekolah dasar. Waktu mereka

habis tersita untuk mencari nafkah sehingga tidak tersisa lagi waktu untuk belajar. Anak-anak mereka tidak bisa menyelesaikan sekolah, karena harus membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun-temurun mereka terjebak dalam keterbelakangan di bawah garis kemiskinan ini.

Keempat, banyak di antara mereka yang tinggal di pedesaan dan tidak memiliki tanah. Kalaupun ada, maka tanahnya sangat kecil. Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja di luar pertanian. Karena petani bekerja secara musiman, maka kesinambungan kerja mereka kurang terjamin. Banyak di antara mereka menjadi pekerja bebas (*self employed*) yang bekerja di bidang apa saja. Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar, maka tingkat upah menjadi rendah, sehingga mengurung mereka di bawah garis kemiskinan. Didorong oleh kesulitan hidup di desa, banyak di antara mencoba berusaha di kota (urbanisasi).

Kelima, banyak di antara mereka yang hidup di kota masih berusia muda dan tidak mempunyai keterampilan (*skill*) atau pendidikan. Sementara kota-kota di negara berkembang tidak siap menampung urbanisasi penduduk desa ini. Apabila di negara maju pertumbuhan industri menyertai urbanisasi dan pertumbuhan kota-kota menjadi menarik bagi masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka proses urbanisasi di negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga kerja. Keadaan mereka di kota dan di desa menjadi buruk, tanpa harapan untuk keluar dari garis kemiskinan.

Secara umum subjektivitas miskin perspektif lembaga/akademisi dan teoritis di Indonesia memiliki kesamaan yakni berfokus kepada pemenuhan kebutuhan dasar sosial ekonomi. Hanya yang berbeda antara tolok ukur satu dengan lainnya adalah sedikit spesifikasi/bidang ilmu dari masing-masing seperti Sajogyo lebih fokus pada pertanian dimana *lebenswelt* nya adalah sistem pertanian sawah/padi, Suharto lebih mensoroti bidang pemberdayaan dan kesejahteraan sosial karena memang *lebenswelt* nya sebagai akademisi/teoritis pekerja sosial dan pemberdayaan manusia, BPS lebih detail ke perhitungan/statistik per kapita GKN/GKNM sesuai dengan lembaganya sebagai badan pusat statistik Indonesia, serta subjektivitas-

subjektivitas lain pun berdasarkan bidang keilmuan masing-masing (*lebenswelt*).

3. Perspektif Kemiskinan: Konsep dan Tolok ukur Antara Al-Qur'an Hadis dengan Fenomenologi Barat

Al-Qur'an sebagai Kitab Suci *rahmatun lil a'lamin* membuktikan bahwa Islam memiliki relevansi dan reliabilitas terhadap dinamika kehidupan sosial budaya masyarakat dunia. Realitas sosial kemiskinan yang selalu fenomenal pun memiliki relevansi pada ajaran Islam. Ajaran-ajaran agama Islam mencakup segala bidang ilmu di muka bumi ini sehingga esensi kemiskinan masyarakat versi Islam secara umum sejalan dengan sudut pandang non Islam. Relevansi Islam terhadap kajian perspektif non Islam memiliki persamaan dan perbedaan tertentu, bedanya bahwa pandangan Islam akan kemiskinan telah diatur langsung dari yang Maha Kuasa yakni Allah Swt., sedangkan kajian non Islam bisa jadi esensi dalil akal manusia semata.

Diantara relevansi kajian Islam versi non Islam (fenomenologi): relativitas kemiskinan menurut pandangan Islam adalah bentuk kekufuran/aniaya diri manusia memiliki relevansi terhadap konsep/tolok ukur kemiskinan pada perspektif subjektivitas sebagian masyarakat. Relevansi nilai norma Islam dalam realitas kemiskinan lain dijelaskan (Anggarani et al., 2010), dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat pengaruh pelatihan syukur terhadap peningkatan *Subjective Well-Being* atau kebahagiaan pada penduduk miskin di

Surakarta. Dari analisis kuantitatifnya menyebutkan dimana ada perbedaan skor kepuasan hidup dan *balance affect* melalui peningkatan efek positif *subjective well-being* antara sebelum dan sesudah pelatihan syukur pada kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol.

Relevansi lain penelitian Yulasteriyani (2018) tentang kemiskinan masyarakat petani kajian pada fenomenologi Schutz memaparkan bahwa kemiskinan masyarakat petani sawah memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang apa itu kemiskinan. Diuraikan di antara kesadaran sosial masyarakat petani terhadap kemiskinan ialah 'miskin adalah pasrah, pendapatan rendah, penyakit hati, akhlak buruk, tidak bertakwa, solidaritas rendah, miskin adalah petani, tidak ada diversifikasi kerja, rumah gubuk, serta miskin adalah manusia yang lemah jasmani rohani (lansia/difabel). Penelitian ini mengemukakan subjektivitas petani yang relevan dengan nilai ajaran Islam bahwa hakikatnya Tuhan tidak menciptakan kemiskinan, manusia dianugerahkan kekayaan atau dengan kecukupan. Jika manusia tidak merasa cukup akan nikmat Tuhan disinilah letak kekufuran/tidak syukurnya makhluk manusia karena manusia yang taat perintah menjauhi larangan-Nya tidak akan pernah inkar kepada nikmat Tuhan.

Selain memiliki kesamaan perspektif Islam dengan pandangan barat, kedua aliran ini juga memiliki perbedaan satu dengan yang lain, di antara perbedaan itu diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Dua Konsep Kemiskinan

Faktor Pembeda	Konsep Miskin (Al-Qur'an Hadis)	Konsep Miskin (BPS, Bank Dunia, Akademisi dan Teoritisi)
Bidang bahasan	Miskin bersifat relatif, miskin sebagai bentuk tidak mampu berusaha terhadap rezeki Allah SWT serta tidak kana'ah	Fenomenologi Schutz mewakili dari perspektif Barat seperti miskin konsep/tolok ukur dari BPS, Bank Dunia, akademisi dan teoritis
Faktor penyebab	Kemiskinan terjadi akibat adanya ketidakseimbangan perolehan atau penggunaan sumber daya alam/disitilahkan sebagai aniaya, karena keengganan manusia menggali sumber daya alam itu untuk mengangkatnya ke	Kemiskinan disebabkan faktor struktural dan kultural, kultural adalah penyebab dari budaya manusia/masyarakat miskin itu sendiri sedangkan struktural berasal dari luar/pemerintah

	permukaan, atau untuk menemukan alternatif penggantinya/kufur	sebagai pembuat kebijakan dan putusan
Dalil Miskin	Dalil al-Qur'an Hadis, diantaranya <i>Faqrun/fakir</i> yang disebutkan 8 kali di dalam al-Qur'an dan <i>as-sakan/miskin</i> disebutkan 33 ayat di dalam al-Qur'an	Filsafat barat Admund Husserl fenomenologi yang dikembangkan Alfred Schutz tentang subjektivitas pandangan manusia berdasarkan inter subjektivitas kesadaran manusia terhadap dunia kehidupan sehari-hari (<i>lebenswelth</i>)
Cara pengentasan kemiskinanya	-Diantara pendekatan praktis adalah: kewajiban orang lain/masyarakat yakni dengan berzakat karena di dalam harta orang lain/orang kaya ada sebagian hak orang fakir/miskin -Kewajiban pemerintah yakni menjalankan peran fungsi nya mensejahterakan rakyat -Terakhir kana'ah sebagai pendekatan teoritis, sifat ini akan membebaskan manusia dari keterpurukan akan harta kekayaan yang dia miliki sehingga tercapai kekayaan abadi yakni kepuasan hati dan kebahagiaan duani akhirat	Pengentasan secara struktural dengan kebijakan-kebijakan pemerintah serta pendekatan pribadi partisipasi masyarakat miskin dalam pemberdayaan masyarakat

Kesimpulan

Realitas sosial kemiskinan pada masyarakat memiliki banyak perspektif dan tolok ukur baik dari agama (Islam) maupun non agama (non Islam). Diantara dua sisi pandangan ini terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya pada sistem sosial budaya manusia/masyarakat yang berlandas al-Qur'an Hadis bahwa miskin adalah kecukupan rezeki dari Tuhan yang tidak disyukuri. Dikatakan bahwa kemiskinan terjadi hanya karena manusia tidak pandai bersyukur serta tidak mau berusaha mencari rezeki Tuhan yang terhampar luas di muka bumi. Islam menyebut istilah ini dengan aniaya diri sendiri sedangkan kondisi aniaya ini akan melahirkan kekufuran/tidak *qana'ah* dari nikmat Tuhan. Konsep/tolok ukur ajaran Islam dalam al-Qur'an-Hadis sangat sederhana yakni manusia dikatakan miskin hanya apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan makan untuk sehari sehingga dalam Islam diajarkan untuk berzakat, infak dan sedekah demi mengentaskan kemiskinan.

Sedangkan perbedaannya ialah kebalikannya tadi yaitu ketika manusia/masyarakat mengukur kemiskinan di luar dari konsep ajaran Islam seperti miskin ditetapkan secara material dengan ukuran-ukuran minimum yang berbeda-beda. Ada banyak konsep/tolok ukur berbeda-beda dari instansi pemerintah/non pemerintah, nasional/internasional, dan akademisi/teoritis seperti BPS, Bank Dunia, Sajogyo dan lainnya yakni kemiskinan diukur berdasarkan pada dunia kehidupan sehari-hari (*lebenswelt*); seperti miskin apabila pendapatan dibawah Rp. 600.000 atau miskin jika per kapita dibawah 2 dolar.

Daftar Pustaka

- Anggarani, F. K., Andayani, T. R., Karyanta, N. A., Studi, P., Fakultas, P., & Maret, U. S. (2010). Pengaruh Pelatihan Syukur terhadap Subjective Well-Being pada Penduduk Miskin di Surakarta. *Hasil Riset*, 44–59.
- Cahya, B. T. (2015). Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif al-Quran Dan Hadis. *Jurnal*

- Penelitian*, 9(1).
- Faris, I. (1979). *Mu'jam Maqayis al- Lughah*. Beirut: Dar al-Jail.
- Ilyas, R. (2016). Manusia sebagai Khalifah dalam Perspektif Islam. *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 7(1), 169–195.
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi:Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Lubis, F. A. (2018). MISKIN MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN. *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2).
- Panjaitan, M. (2000). *Memberdayakan kaum miskin*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sajogyo. (1982). Menelaah Garis Kemiskinan. In *Lokakarya Metodologi "Kaji-Tindak" Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Salim, E. (1984). *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Shihab, M. Q. (2017). *Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*. Bandung: Mizan.
- Statistik, B. P. (2019a). Kemiskinan dan Ketimpangan. Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Statistik, B. P. (2019b). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/07/15/1629/persentase-penduduk-miskin-maret-2019-sebesar-9-41-persen.html>
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta.
- Van, H. (1990). *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.